



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari
Muhammad Ikhhlashul Mu'min D.

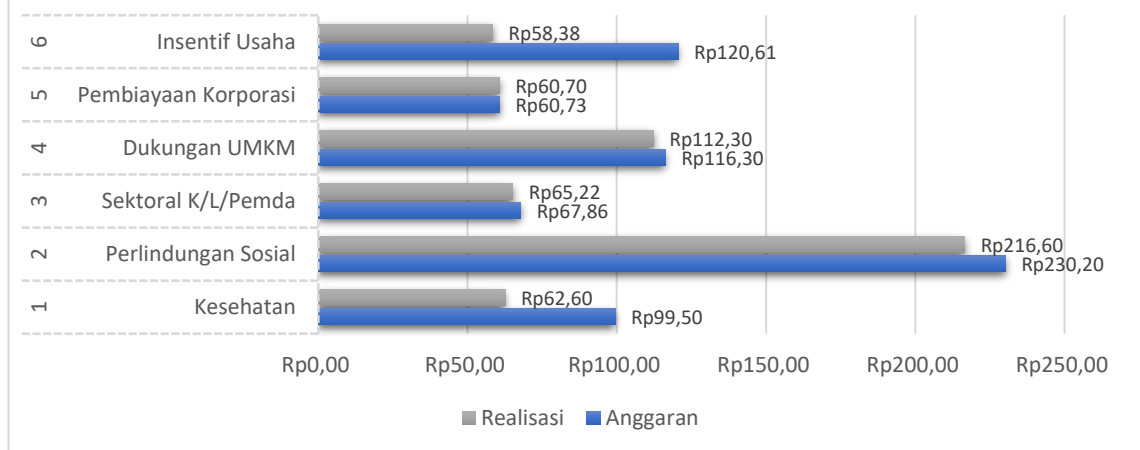
Permasalahan dan Tantangan Penyaluran Bantuan Sosial Jabodetabek

Isu Strategis

Pandemi Covid-19 telah memberikan implikasi pada beberapa aspek antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya pendapatan negara, dan meningkatnya belanja serta pembiayaan. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan fokus pada enam klaster yaitu klaster kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha.

Anggaran dan Realisasi PC-PEN TA 2020

(dalam triliun)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp695,20 triliun dengan realisasi sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83%. Berdasarkan grafik diatas, sebesar 37,6% realisasi anggaran PC-PEN tahun 2020 ditujukan untuk program perlindungan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian lebih kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 salah satunya melalui Bantuan Sosial (Bansos) Sembako bagi 1,9 juta masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Bansos Sembako Jabodetabek bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi, membantu kebutuhan pokok masyarakat selama masa pandemi, dan sebagai pelaksanaan program jaring pengaman sosial penanganan COVID-19. Pada

2022

Komisi VIII

tahun 2020, Anggaran Bansos Jabodetabek dianggarkan sebesar Rp6.498.000.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.492.509.468.000. Bansos tersebut disalurkan secara bertahap tiap bulan melalui 2 (dua) putaran dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Bansos Sembako Jabodetabek Tahun 2020

Keterangan	Anggaran	Realisasi	(%)
Putaran I April – Juli 2020 (11.428.668 Paket)	Rp3.420.000.000.000	Rp3.419.909.468.000	99,9
Putaran II Juli – Des 2020 (12.279.580 Paket)	Rp3.078.000.000.000	Rp3.072.600.000.000	99,8
Total	Rp6.498.000.000.000	Rp6.492.509.468.000	99,9

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kemensos 2020

Anggaran Bansos Sembako Jabodetabek yang relatif besar dan pengadaan yang dilakukan tanpa melalui lelang (penunjukkan langsung) sangat rawan dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut terbukti dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas PPK dan Mantan Menteri Sosial (JPB) atas dugaan pemberian suap dan fee dari rekanan. Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemensos TA 2020 juga diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,34 triliun tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia Bantuan Paket Sembako Jabodetabek. Atas permasalahan tersebut, opini Laporan Keuangan (LK) Kemensos pada TA 2020 mengalami penurunan yang sebelumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Permasalahan

Tahun 2021, Kementerian Sosial melakukan perubahan skema Bantuan Paket Sembako menjadi Bantuan Sosial Tunai yang ditujukan untuk masyarakat Jabodetabek. Besaran uang yang diberikan senilai dengan harga bansos sembako sebelumnya senilai Rp300.000 per bulan/kepala keluarga. Dengan adanya perubahan skema ini diharapkan celah penyalahgunaan dana bansos melalui pengadaan barang yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara dapat diminimalisir. Meskipun begitu, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Pemerintah dalam penyaluran BST Jabodetabek antara lain:

Pertama, ketepatan sasaran penerima manfaat dimana tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan penerima bansos sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bansos yang sebagian besar belum dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan data pemutakhiran DTKS Bulan Mei 2021 ditemukan dari 140.483.071 individu yang terdaftar dalam DTKS masih terdapat 80,95% atau sebanyak 113.725.924 individu namun belum dilakukan pemutakhiran. Jumlah yang sangat banyak tersebut perlu mendapat perhatian bersama baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengingat pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir sedangkan masyarakat masih membutuhkan bantuan sosial yang datanya masih mengacu dari DTKS.

Kedua, efektivitas pemanfaatan bantuan tunai yang diterima, sebagaimana diketahui bantuan yang diterima masyarakat secara tunai dapat dibelanjakan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, fleksibilitas pemanfaatan bansos tunai ini belum dibarengi dengan adanya mekanisme pengawasan secara komprehensif atas efektivitas pemanfaatan bantuan sosial tunai. Sehingga, sampai saat ini Pemerintah belum dapat mengetahui efektivitas bansos tunai yang telah disalurkan apakah telah tepat guna dan tepat manfaat.

Ketiga, mekanisme penyaluran BST Jabodetabek yang masih bersifat manual, penyaluran BST Jabodetabek masih dilakukan melalui pengambilan secara langsung di PT Pos Indonesia dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu penerima bansos. Mekanisme penyaluran BST secara manual tersebut dinilai kurang efektif, sebab selain menimbulkan kerumunan yang dapat berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19, penyaluran dengan mekanisme seperti ini juga rawan dengan adanya pungutan liar (pungli) yang dapat dilakukan oleh oknum. Sedangkan, saat ini tengah dilakukan uji coba penyaluran bansos dengan melibatkan perusahaan *fintech* meskipun lingkungannya baru sebatas pada penyaluran bansos PKH dan BPNT dan belum mencakup pada penyaluran BST.

Saran Perbaikan

Meskipun Bansos Jabodetabek merupakan bantuan yang bersifat *extraordinary*, Pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi atas bansos sembako maupun bansos tunai yang telah disalurkan. Beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan Komisi VIII sebagai mitra kerja Kemensos agar penyaluran bansos dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna di masa mendatang, antara lain mendorong Kemensos untuk:

Pertama, segera menyelesaikan permasalahan terkait ketidakwajaran harga pengadaan paket sembako Bansos Jabodetabek TA 2020 sebesar Rp3,34 Triliun;

Kedua, bersinergi dengan Kemendagri, BPS, dan Pemda dalam rangka pemutakhiran DTKS secara berkala untuk meminimalisir adanya *inclusion error* dan *exclusion error* dalam pendataan masyarakat miskin sehingga penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran;

Ketiga, melakukan digitalisasi penyaluran bansos khususnya yang bersifat tunai secara menyeluruh dengan melibatkan perusahaan *fintech* seperti LinkAja, Gopay, Ovo, dll agar dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi dan memudahkan pengendalian, kontrol, juga pengawasan oleh Pemerintah. Meskipun masih perlu dipikirkan kembali terkait ketersediaan infrastruktur penunjang dan literasi digital masyarakat dalam pengoperasian aplikasi *fintech*.

Referensi

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020. Jakarta

Kemenkeu RI. 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020. Jakarta. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>, pada 07 Maret 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Jakarta

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan DTKS. Jakarta

CNN Indonesia. 2021. Ace Nilai Pungli Bansos Terdorong Budaya 'Uang Terima Kasih'. Jakarta. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210731152228-20-674698/ace-nilai-pungli-bansos-terdorong-budaya-uang-terima-kasih>, pada 04 Maret 2022

Akhir, Dani Jumaidil. 2020. Pengumuman! Bansos Jabodetabek 2021 Diganti Jadi Uang Tunai. Diakses dari: <https://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327970/pengumuman-bansos-jabodetabek-2021-diganti-jadi-uang-tunai>